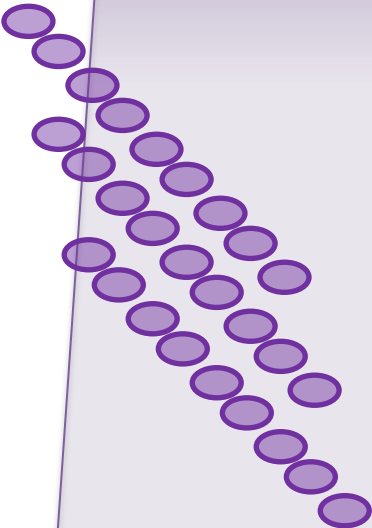


# BAB II. TINJAUAN PUSTAKA





## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Menurut para ekonom modern, inflasi berupa kenaikan secara menyeluruh jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang/komoditas dan jasa. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Teori Pembentukan Inflasi**

Mengacu pada teori ekonomi *Neo-Keynesian* dalam Gordon (1997) pendekatan determinan inflasi Indonesia dapat dijelaskan melalui inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan ekspektasi inflasi. Pendekatan model pembentukan inflasi ini dikenal juga dengan istilah *Expectation-Augmented Phillips Curve*. Inflasi permintaan direfleksikan sebagai pergerakan sepanjang kurva Phillips sedangkan inflasi penawaran dan ekspektasi inflasi direfleksikan sebagai pergeseran kurva Phillips sehingga mengubah trade-off antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau tingkat pengangguran



### **2.1.2. Inflasi Permintaan (*demand-pull inflation*)**

Jenis inflasi ini biasa dikenal sebagai *Phillips Curve Inflation*, yaitu merupakan inflasi yang dipicu oleh interaksi permintaan dan penawaran domestik jangka panjang. Dalam hal ini kebijakan moneter merupakan salah satu determinan penting pada jenis inflasi ini melalui pengaruhnya terhadap konsumsi, produksi dan investasi. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi adalah perubahan gradual atau kejutan kebijakan fiskal, permintaan luar negeri, perubahan perilaku konsumen dan produsen serta tingkat dan pertumbuhan efisiensi dan produktivitas perekonomian.

### **2.1.3. Inflasi Penawaran (*cost-push inflation*)**

*Cost-push inflation* atau juga bisa disebut *supply-shock inflation* merupakan inflasi penawaran yang disebabkan oleh kenaikan pada biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Inflasi penawaran ini mencakup *supply shocks inflation* yang memicu kenaikan harga penawaran barang. Faktor *shocks* yang memicu inflasi ini adalah kenaikan harga komoditas internasional termasuk harga minyak mentah dunia, kenaikan harga komoditas yang harganya dikontrol pemerintah, kenaikan atau penurunan harga bahan makanan akibat gangguan produksi yang disebabkan oleh gangguan iklim, perubahan harga barang impor akibat dari terjadinya perubahan nilai tukar, dan kenaikan inflasi luar negeri.



#### 2.1.4. Ekspektasi Inflasi

Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang dapat bersikap adaptif atau *forward looking*. Ekspektasi inflasi merupakan determinan inflasi yang berperan penting secara subyektif dalam pembentukan harga dan upah. Jika pelaku ekonomi menilai bahwa berdasarkan pengalaman inflasi masa lalu inflasi akan tetap terjadi atau bertahan, maka pelaku ekonomi tersebut akan menaikkan harga, meskipun prospek ekonomi tidak menunjukkan sinyal akan terjadi tekanan permintaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa espektasi inflasi pada dasarnya dibentuk oleh pandangan subyektif dari pelaku ekonomi mengenai apa yang akan terjadi ke depan. Perilaku pembentukan ekspektasi inflasi ini disebut ekspektasi inflasi adaptif, yang terbentuk dari peristiwa-peristiwa ekonomi di masa lalu yang mengakibatkan inflasi menjadi persisten.

#### 2.2. Studi Literatur

Dengan mempelajari pengalaman 14 negara berkembang selama periode 1980-an dan 1990-an, Mohanty and Klau (2001) menemukan bahwa *shock* penawaran eksogen, khususnya harga makanan, merupakan penentu penting variabilitas inflasi. Harga makanan biasanya merupakan bagian yang besar dalam pembentukan Indeks Harga Konsumen (IHK) di negara berkembang. Selain itu harga makanan sangat *volatile* karena dipengaruhi cuaca dan restriksi perdagangan. Faktor permintaan yang didekati dengan menggunakan kesenjangan output, dan kelebihan uang (*excess money*) tidak



memainkan peran yang besar. Namun demikian, pertumbuhan upah dan perubahan nilai tukar memiliki pengaruh terhadap volatilitas inflasi di banyak negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa persistensi inflasi memainkan peran penting dalam menjelaskan tingkat dan variasi inflasi.

Marhastari dan Miranti (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ekspektasi inflasi, *output gap*, nilai tukar Rp/USD, dan dummy Idul Fitri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi inti pada periode 2004-2007. Sedangkan untuk menganalisis inflasi *volatile food* digunakan variabel ekspektasi *volatile food*, produksi padi Kabupaten Ciamis sebagai salah satu pemasok kebutuhan beras di Priangan Timur. Variabel ekspektasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi *volatile food*, sedangkan variabel produksi padi yang merupakan *proxy* dari komoditas beras sebagai komoditas penyumbang terbesar kelompok bahan makanan berpengaruh negatif. Hal ini berarti bahwa penurunan produksi padi akan meningkatkan inflasi *volatile food*.

Sementara itu Wimanda (2006) dalam studinya mengenai inflasi regional di Indonesia juga menemukan bahwa setelah krisis ekonomi tingkat volatilitas inflasi di daerah menjadi lebih tinggi. Selain itu, antara inflasi-inflasi daerah dengan inflasi nasional tidak menunjukkan adanya konvergensi sehingga pola pergerakannya seringkali berbeda dari pergerakan inflasi nasional. Hal inilah yang dapat mengakibatkan kebijakan moneter tidak secara penuh efektif dalam menekan laju inflasi di daerah.



### 2.3. Indikator Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sedangkan Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Notasinya sebagai berikut:

$$\frac{\text{tingkathrga}_t - \text{tingkathrga}_{t-1}}{\text{tingkathrga}_{t-1}} \times 100 = \text{rateofnflaion}$$

Pada umumnya, pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan statistik perekonomian suatu negara menggunakan *Consumer Price Index* (CPI) dan *Producer Price Index* (PPI) sebagai pengukur tingkat inflasi. Namun, dalam perkembangannya metode ini memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya adalah karena metode ini menggunakan kumpulan yang mewakili sebuah subset keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian, maka indeks harga tersebut tidak secara akurat merefleksikan seluruh perubahan harga yang terjadi. Selain itu, CPI dan PPI juga kurang dapat mengakomodasi jenis barang dan jasa yang baru diciptakan meskipun kelompok subset



barang dan jasa yang digunakan sebagai pengukur CPI dan PPI selalu direvisi dari waktu ke waktu.

Para ekonom cenderung menggunakan *Gross Domestic Product Deflator* (GDP Deflator) untuk mengukur tingkat inflasi. GDP Deflator adalah rata-rata harga seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang yang dibeli. Penghitungan GDP Deflator dinotasikan sebagai berikut:

$$GDPDeflator = \frac{NominalGDP}{RealGDP} \times 100$$

Masyarakat yang menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang dan jasa tidak akan mengalami inflasi. Gejala yang mungkin terjadi adalah perubahan relatif harga suatu barang (misalnya x) terhadap barang yang lain (misalnya y) atau  $P_x/P_y$ , atau menurut istilah ekonomi, terjadi perubahan *term of trade* (TOT) suatu kelompok barang terhadap kelompok barang yang lain. Namun, cara itu tidak efisien karena dalam barter harus ada *double coincident of needs* agar pertukaran barang dapat terjadi. Tanpa keberadaan uang, dibutuhkan banyak sumber daya waktu dan usaha untuk melakukan pertukaran yang saling menguntungkan. Selain itu, banyak modal yang tertanam dalam bentuk persediaan (*inventory*). Untuk menghindari kesulitan dan ketidakefisienan tersebut, masyarakat setuju menggunakan suatu komoditas umum sebagai media perantara pertukaran yaitu uang.

Bagi masyarakat, uang adalah alat pertukaran yang lazim. Dengan uang, orang dapat memperdagangkan barang dan jasa, dan tidak langsung mempertukarkannya dengan barang dan jasa yang lain.



Uang memiliki berbagai macam bentuk dan terbuat dari berbagai bahan, baik dari logam mulia maupun dari bahan yang kurang berharga seperti kertas atau logam biasa. Pada masa kini, nilai intrinsik uang biasanya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya, dan inilah salah satu faktor penyebab inflasi.

Pengendalian inflasi penting dilakukan karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Menurut Paul A. Samuelson, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Moderate inflation*, disebut juga "inflasi satu digit", adalah inflasi dengan karakteristik terjadinya kenaikan harga secara lambat. Pada umumnya, pada tingkat inflasi ini, orang masih mau





memegang uang tunai dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

2. *Galloping inflation*, yaitu inflasi yang terjadi pada tingkatan 20% sampai 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi ini, orang hanya mau memegang uang seperlunya, dan cenderung menyimpan kekayaan dalam bentuk aset-aset riil. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan dana dialokasikan melalui cara-cara selain yang berorientasi pada tingkat bunga. Orang hanya bersedia memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Inflasi jenis ini mengakibatkan terjadinya gangguan serius pada perekonomian karena masyarakat cenderung menyalurkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada di dalam negeri (*capital outflow*).
3. *Hyper inflation*, yaitu inflasi dengan tingkat sangat tinggi, berkisar antara jutaan persen per tahun. Jika banyak pemerintahan masih sanggup bertahan menghadapi *galloping inflation*, maka tidak ada yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.

Dari segi penyebabnya, inflasi dapat digolongkan menjadi:

1. *Natural inflation* dan *Human Error inflation*. *Natural inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab alamiah yang tidak dapat dicegah oleh manusia, sedangkan *human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia.



2. *Actual/anticipated/expected inflation* dan *unanticipated/unexpected inflation*. Pada *expected inflation*, tingkat suku bunga pinjaman riil sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Hal ini dinotasikan:

$$r_t^e \cong R_t - \pi_t^e$$

Sedangkan pada *unexpected inflation*, tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3. *Demand pull* dan *cost push inflation*. *Demand pull inflation* diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregat/ Agregate Demand (AD) barang dan jasa pada suatu perekonomian, sedangkan *cost push inflation* terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif/ Agregate Supply (AS) barang dan jasa pada suatu perekonomian.
4. *Spiralling inflation*, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya, sementara inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat inflasi terdahulu, demikian seterusnya.
5. *Imported inflation* dan *domestic inflation*. *Imported inflation* adalah inflasi yang dialami oleh suatu negara karena posisinya sebagai price taker dalam pasar perdagangan internasional. Sedangkan *domestic inflation* hanya terjadi di suatu negara tanpa mempengaruhi negara-negara lain.



## 2.4. Disagregasi inflasi

Inflasi Inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, meliputi:

- Interaksi permintaan-penawaran
- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
- Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen

Inflasi non Inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri dari :

- Inflasi *Volatile Food*.

Inflasi yang dipengaruhi *shocks* dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.

- Inflasi *Administered Prices*

Inflasi yang dipengaruhi *shocks* berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

## 2.5. Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.



Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK).